

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntansi sektor publik terus mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menguatkan akuntabilitas dan transparansi untuk penyajian laporan keuangan. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Kusuma dkk, 2016). Pemerintah juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan isi laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk memberikan suatu informasi kepada *stakeholder* atau pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai dasar dalam membuat keputusan maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangannya. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi karakteristik kualitas sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti. Pemerintah daerah yang tidak memenuhi kriteria karakteristik kualitatif akan mengakibatkan kerugian daerah, kurangnya penerimaan, kelemahan administratif, inefisiensi, dan ketidakefektifan.

Untuk dapat menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan dibutuhkan adanya sistem informasi yang baik dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain sumber daya manusia juga dibutuhkan adanya pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi yang memadai. Tujuan dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyatakan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. LKPD harus mencakupi efektivitas dari sistem pengendalian internal kecukupan pengungkapan, dan patuh terhadap peraturan Perundang-undangan.

Terdapat banyak temuan dan penyimpangan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditemukan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dalam IHPS I Tahun 2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 ditemukan adanya akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP yang berlaku (www.bpk.go.id). Dalam pemeriksaan LKPD TA 2017 BPK menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan SAP yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai opini yang lebih baik.

Tabel 1.1
Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kupang	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP
Kab. TTS	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Alor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Belu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Ende	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Flores Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Lembata	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Malaka		TMP	TMP	WDP	WDP
Kab. Manggarai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Manggarai Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Manggarai Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Nagekeo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Ngada	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Rote Ndao	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Sabu Raijua	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Sikka	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Kab. Sumba Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Sumba Barat Daya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Sumba Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Sumba Timur	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP

(www.bpk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Timor Tengah Selatan masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu Relevan dikarenakan kas dibendahara FTKP belum disahkan sebagai realisasi belanja sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai kas oleh sebab itu data tersebut belum lengkap. Terdapat selisih kas dibendahara pengeluaran dinas kesehatan yang belum memproses selisih kas tersebut, terdapat kelemahan pengendalian internal atas proses penatausahaan dan penyajian aset yaitu inventarisasi yang belum dapat ditelusuri lokasi dan dokumen pendukung, nilai kas lainnya atas dana BOS dan beban barang dan jasa atas dana BOS belum dapat diverifikasi dan pencatatanya tidak akurat, sehingga tidak memenuhi kriteria keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten TTS (<http://kupang.bpk.go.id/>).

Permasalahan dalam menyusun laporan keuangan salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) karena dalam pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas seperti mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan, serta mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Pemanfatan teknologi informasi juga berperan penting dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengolahan data, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak kehilangan nilai informasinya.

Penyusunan laporan keuangan daerah harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai (Arfianti, 2011).

Sistem pengendalian internal laporan keuangan dapat memberikan kepercayaan terhadap kualitas dan keandalan informasi laporan keuangan. Sistem pengendalian internal juga diharapkan dapat mencapai efektivitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor pencapain kualitas laporan keuangan yaitu gaya kepemimpinan yakni bagaimana cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja secara produktif dan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya komitmen organisasi dapat meningkatkan kepatuhan sesuai dengan SAP yang berlaku.

Terdapat beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi penelitian tersebut masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Mansur dkk (2017), Yuliani & Agustini (2016), Muda dkk (2018) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan penelitian oleh Agung & Gayatri (2016), Kusuma dkk (2016) dan Surastiani & Handayani (2015) menyatakan sebaliknya .

Penelitian oleh Agung & Gayatri (2016) , Kusuma dkk (2016) & Anggraeni & Riduwan (2014) menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Mansur dkk (2017) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan

keuangan. Agung & Gayatri (2018), Efendi dkk (2017) dan Kusuma dkk (2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian oleh Mansur dkk (2017) dan Surastiani & Handayani (2015) teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Agung & Gayatri (2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Agung & Gayatri (2018) dengan menambah variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Peneliti menganggap penting untuk diteliti kembali karena terdapat ketidakkonsistenan hasil dari setiap variabel independen yang diuji. Untuk memperbaiki ketidakkonsistenan penulis menambah variabel intervening yakni variabel sistem pengendalian internal. Menurut penelitian yang dilakukan Kusuma dkk (2016) ada pengaruh tidak langsung kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi LKPD melalui sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar pemerintah daerah setempat dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangannya.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam membuat laporan keuangan dan dapat meningkatkan kualitas

informasi laporan keuangan dengan adanya perbaikan dalam sistem pengendalian internal. Diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit Badan Pemeriksaaan Keuangan.

B. Batasan Masalah

Penelitian difokuskan pada Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan kepala bagian keuangan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini hanya menguji 5 faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah yaitu kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Internal ?
2. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Internal ?
3. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Internal ?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Internal ?
5. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?

6. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh positif Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?
7. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?
8. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?
9. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?
10. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat memediasi Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?
11. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat memediasi Teknologi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?
12. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat memediasi Komitmen Kepemimpinan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?
13. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat memediasi Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengendalian Internal
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Teknologi Informasi terhadap Sistem Pengendalian Internal

3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Sistem Pengendalian Internal
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Sistem Pengendalian Internal
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
9. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
10. Untuk mendapatkan bukti empiris Sistem Pengendalian Internal memediasi hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. Untuk mendapatkan bukti empiris Sistem Pengendalian Internal memediasi hubungan antara Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

12. Untuk mendapatkan bukti empiris Sistem Pengendalian Internal memediasi hubungan antara Gaya Kepemimpinan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
13. Untuk mendapatkan bukti empiris Sistem Pengendalian Internal memediasi hubungan antara Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat menerapkan faktor-faktor tersebut agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
- b. Manfaat secara akademis, guna mengembangkan dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, baik masukan maupun pertimbangan terkait dengan pengaruh kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal untuk mewujudkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.